



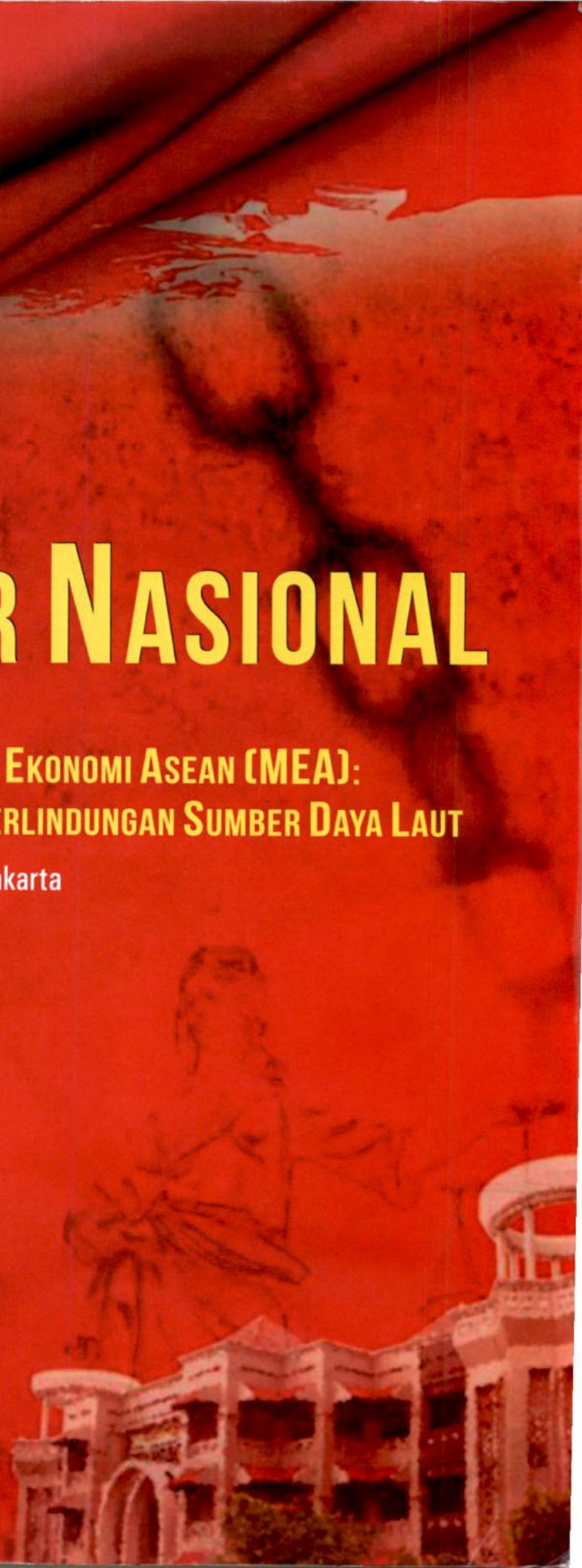
Proceeding

SEMINAR NASIONAL

**PELUANG DAN TANTANGAN
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015



25062015
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL
**MEDIA
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?	
Hikmahanto Juwana	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
Mukti Fajar ND	11
BIDANG I: POLITIK HUKUM	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
Rochmani	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
Ane Permatasari	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
Khaidir Anwar dan Eddy Rifai	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
Septi Nur Wijayanti	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
Rofi Aulia Rahman	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
Fadia Fitriyanti, Andika Putra	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
Magdariza	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Dewi Nurul Musjtari	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL Yeni Widowaty	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA Ferdi	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA Naya Amin Zaini	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Nanik Prasetyoningsih	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG Tanto Lailam	191
BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA FX. Sumarja	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING Djoko Imbawani Atmadjaja	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Delfiyanti	241

BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT

18. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Eko Suwarni..... 256
19. *MARINE PROTECTION AREA* SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA
Noer Indriati..... 266
20. PENERAPAN *BLUE ECONOMY* DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA
Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid..... 274
21. SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN *DEEP ECOLOGY*
Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso..... 386
22. PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN
Shinta Agustina..... 301
23. OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT
Indien Winarwati..... 313
24. PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Zulfikar Jayakusuma..... 327
25. PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*
Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian..... 339
- BIDANG IV: UMUM**
26. STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN *GREEN ECONOMY* MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*
Siti Nurhayati..... 360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (<i>PROCUREMENT</i>) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	Agus Budianto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	Reaza Rahmatika	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	Siti Zulaekhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> (TRANSFORMASI <i>JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	Qur'ani Dewi Kusumawardani	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	Martino Sardi	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	Masrullah, Murdian Munandar	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu	473

PENERAPAN *BLUE ECONOMY* DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA

Dhiana Puspitawati

Yasniar Rachmawati Madjid

A. Pendahuluan

Regionalisasi suatu kawasan telah di kenal sejak beberapa dekade yang lalu, bervariasi mulai dari kerjasama regional, pembangunan regional serta sistem perekonomian regional. Fitur regionalisasi dianggap mampu mendorong sistem perekonomian global melalui sistem integrasi ekonomi. Dalam perkembangannya, integrasi ekonomi dalam suatu region merupakan hal yang penting dalam pencapaian suatu peningkatan ekonomi di kawasan tertentu seperti misalnya di kawasan Asia Tenggara. ASEAN, sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara menyikapi hal tersebut dengan menyepakati pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau yang disebut juga dengan *ASEAN Economic Community* (AEC). Dengan diberlakukannya MEA pada tahun 2015 ini, tentunya Indonesia harus meningkatkan daya saingnya.

Adapun salah satu potensi Indonesia yang dapat mendongkrak daya saing Indonesia adalah melalui pemanfaatan sumber daya laut secara optimal. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, maka seyogyanyalah Indonesia menyandarkan perekonomiannya kepada sektor kelautan dengan menggali potensi-potensi sumber daya laut sebagai produk dan jasa unggulan yang bisa bersaing dalam pasar integrasi ekonomi. Tentunya pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ketersediaan sumber daya itu sendiri. Penelitian ini menganalisa apa yang harus dilakukan Indonesia untuk dapat memanfaatkan sumber daya laut secara optimal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ketersediaan sumber daya tersebut. Diperlukan suatu konsep yang tepat untuk mengintegrasikan visi pembangunan yang sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan dominansi laut.

Penelitian ini menawarkan penerapan konsep *Blue Economy* dalam pemanfaatan sumber daya laut. Konsep ini merupakan penggabungan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Terdapat tiga point penting dalam konsep Ekonomi Biru. Pertama, kepedulian sosial, yaitu dengan menciptakan lapangan kerja baru serta peningkatan pendapatan dan nilai. Hal ini sesuai dengan semangat pembangunan nasional yang berkelanjutan, yaitu pro-job dan pro-poor.

Kedua, efisiensi sumber daya alam, yang mewujudkan peningkatan nilai tambah, efisiensi dan *low-cost production* serta pemanfaatan inovasi dan teknologi baru. Hal ini sejalan dengan *pro-growth*. Ketiga, sistem produksi yang tidak menyisakan limbah yang ramah lingkungan guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan semangat *pro-environment*.

B. Pembahasan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak bisa meninggalkan laut dalam prioritas pembangunan nasionalnya. Perlu konsep yang tepat untuk mengintegrasikan visi pembangunan yang sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan dominasi laut. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini prioritas pembangunan baik di tingkat nasional maupun di daerah masih berorientasi ke daratan. Bahkan pengalokasian anggaran dari pusat untuk daerah disesuaikan dengan luas wilayah daratannya. Dengan kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri dari lautan, maka perlu pergeseran paradigma pembangunan yang lebih memahami jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari dan negara kepulauan terbesar di dunia serta memadukan kekuatan ekonomi berbasis darat dan laut sebagai sinergi kekuatan ekonomi nasional. Demikian juga dengan pembangunan di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Meskipun orientasi pembangunan nasional Indonesia masih sangat berorientasi ke daratan, bukan berarti potensi kelautan sama sekali tidak dihiraukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan Kelautan sebenarnya sudah dimunculkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam Bab IV.1.7 Lampiran UU 17/2007 disebutkan bahwa salah satu arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Pada pembahasannya jelas disebutkan bahwa pembangunan kelautan merupakan sasaran RPJPN yang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan dan teknologi. Selanjutnya, pencapaian sasaran tersebut akan dilakukan melalui: peningkatan wawasan bahari, penguatan sumber daya manusia, pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai negara peratifikasi UNCLOS 1982 termasuk pengamanan wilayah laut serta pemanfaatan sumber daya laut, pengembangan industri kelautan, mitigasi bencana serta pemberantasan kemiskinan masyarakat pesisir.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Selanjutnya, untuk mencapai Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, sebagaimana tertuang dalam UUNo.17/2007 Tentang RPJPN, diperlukan 5 pilar strategi yang meliputi: budaya bahari, tata kelola laut, ekonomi kelautan, pertahanan, keamanan dan keselamatan di laut serta lingkungan laut¹²⁴. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sektor kelautan dan kemaritiman seyogyanya menjadi *leading sector* dalam pembangunan nasional, yaitu: (i) terus meningkatnya permintaan yang didukung oleh besarnya kapasitas supply; (ii) input berasal dari sumber daya lokal yang berlangsung di daerah, sedangkan outputnya bisa diekspor serta (iii) dapat membangkitkan industri hulu dan hilir yang besar.¹²⁵ Dengan demikian hal ini sesuai dengan semangat pembangunan nasional berlandaskan pembangunan yang berkelanjutan yang pro-poor, pro-job, pro-growth serta pro-environment.

Prioritas pembangunan kelautan dan kemaritiman bukan berarti meninggalkan pembangunan di darat atau meninggalkan sumber daya di darat, akan tetapi mengintegrasikan pembangunan berbasis darat dan laut secara berkelanjutan demi kemakmuran rakyat. Semangat pembangunan nasional, pro-poor, pro-job, pro-growth serta pro-environment sangatlah cocok dengan konsep *Blue Economy* yang diperkenalkan oleh Gunter Pauli. *Blue Economy* sebagai program pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan akan sangat cocok dilaksanakan di sebuah negara yang memiliki wilayah laut yang luas seperti Indonesia, menjadi pondasi dan sumber ketahanan pangan Indonesia.¹²⁶

Konsep Ekonomi Biru

Konsep *Blue Economy* (Ekonomi Biru) pertama kali dikenalkan oleh Gunter Pauli dalam bukunya *The Blue Economy, 10 years, 100 innovations and 100 millions job* yang diterbitkan pada tahun 2010. Konsep Ekonomi Biru merupakan konsep yang menggabungkan pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Konsep ini mencontoh cara kerja alam dan bekerja sesuai dengan apa yang disediakan alam dengan efisien dan tidak mengurangi akan tetapi justru memperkaya alam. Limbah dari yang satu menjadi sumber energi bagi yang lain, sehingga sistem kehidupan dalam ekosistem menjadi seimbang, energi didistribusikan secara efisien dan merata tanpa ekstraksi energi eksternal, bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrient dan energi tanpa meninggalkan limbah untuk mendayagunakan kemampuan seluruh kontributor dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semuanya. Terdapat tiga point penting dalam konsep Ekonomi Biru. Pertama, kepedulian sosial, yaitu dengan menciptakan lapangan

¹²⁴Ibid.

¹²⁵Dewan Kelautan Indonesia, "Tantangan Bangsa Indonesia dalam Pembangunan Industri Kelautan dan Perikanan menuju Ekonomi Biru di abad ke-21", paper dipresentasikan pada Seminar Kelautan, Surabaya, 4 Desember 2012.

¹²⁶Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo, sebagaimana dikutip dalam Dewan Kelautan Indonesia, "Cara Optimalkan SDA Laut Ramah Lingkungan", *Indonesia Maritim*, Edisi 29, Tahun VIII, Januari-Maret 2013, 8.

kerja baru serta peningkatan pendapatan dan nilai. Hal ini sesuai dengan semangat pembangunan nasional yang berkelanjutan, yaitu pro-job dan pro-poor. Kedua, efisiensi sumber daya alam, yang mewujudkan peningkatan nilai tambah, efisiensi dan *low-cost production* serta pemanfaatan inovasi dan teknologi baru. Hal ini sejalan dengan pro-growth. Ketiga, sistem produksi yang tidak menyisakan limbah yang ramah lingkungan guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan semangat pro-environment.

Konsep Ekonomi Biru bermula dari konsep *Green Economy* (Ekonomi Hijau) yang berkembang sebagai kritik dari *Brown Economy*, yang dianggap mencemari lingkungan. Konsep Ekonomi Hijau menekankan pada upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia, peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja yang didorong oleh investasi yang rendah pencemaran. Pada tahun 2010, sebagai kepanjangan dari Ekonomi Hijau muncullah Ekonomi Biru dengan semboyan *blue sky-blue ocean* dengan penekanan *zero waste*. Pada pemaparannya di Jakarta pada tahun 2013, Gunter Pauli memaparkan tentang konsep pengembangan ekonomi berbasis kelautan yang dikelola secara komprehensif dengan manajemen berkelanjutan dan pelestarian aset. Konsep ini akan sangat menguntungkan jika dijadikan acuan dalam memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan kemaritiman di Indonesia.¹²⁷

Adopsi konsep Ekonomi Biru pada awalnya digagas oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Konferensi Rio di Brazil pada tahun 2012. Pada pidatonya SBY tidak hanya menyerukan ajakan untuk menerapkan Ekonomi Hijau tetapi juga menyerukan untuk mengimplementasikan Ekonomi Biru, di mana laut menjadi bagian yang terintegrasi untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Model konsep Ekonomi Biru perlu dijadikan bagian dari *grand design* pembangunan kelautan nasional. Sebenarnya konsep Ekonomi Biru bisa diterapkan di mana saja serta di usaha skala apa saja baik skala usaha kecil, menengah maupun besar, dengan memanfaatkan potensi setempat/lokal, yang penting setiap segmen usahanya mampu menyediakan pekerjaan, menghasilkan pendapatan, menguntungkan dan semua limbah termanfaatkan sehingga lingkungan terpelihara.

Hal ini dikarenakan Ekonomi Biru adalah tentang kemampuan dalam berinovasi, kreativitas dalam menyelesaikan masalah, mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara sangat efisien, serta memanfaatkan limbah yang dihasilkan agar menjadi bahan baku dalam proses produksi yang lain dalam bentuk diversifikasi usaha yang kompetitif dan menguntungkan. Dengan demikian dalam penerapan Ekonomi Biru harus dibuat desain yang menyeluruh dimulai dari hasil riset, proses produksi, model bisnis, model pembiayaan (finansial) serta desain sistem. Potensi sumber daya alam yang telah diambil harus mengalami penambahan nilai (*added value*) agar

¹²⁷Pauli, Gunter, *The Blue Economy: 10 years, 100 innovations and 100 million jobs*, 2010; Pidato Gunter Pauli pada Forum Group Discussion tentang Ekonomi Biru di Jakarta pada tanggal 26 November 2013.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

nilai jualnya meningkat, bukan hanya sebagai bahan baku modal saja, namun menjadi barang hasil produksi yang siap pakai. Produk yang telah mengalami penambahan nilai (*Value Added Product*) akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja, pangsa pasar ekspor, peningkatan konsumsi produk lokal oleh masyarakat dan perlindungan lingkungan.

Pengembangan Ekonomi Biru dalam Bidang Kelautan dan Kemaritiman

Selanjutnya, dalam manajemen berbasis Ekonomi Biru, semua hal harus masuk dalam pertimbangan untuk memperoleh imbalan. Manajemen berbasis Ekonomi Biru yang berhasil akan menghasilkan beragam pekerjaan bagi masyarakat, pemasukan yang lebih banyak karena produk yang dihasilkan lebih beragam, peningkatan konsumsi masyarakat lokal serta pemasukan dari hasil ekspor yang stabil. Peran Pemerintah harus mampu memanfaatkan kebijakan yang dimiliki untuk memanfaatkan pajak yang telah dipungut dari rakyat menjadi modal untuk mendanai *project* yang berbasis Ekonomi Biru. Selain itu, pemerintah juga harus menjadi fasilitator yang melibatkan parapengusaha, akademisi, para ahli di bidangnya masing-masing serta masyarakat untuk turut berperandidalamnya.

Setidaknya ada lima hal dalam pengembangan ekonomi biru di Indonesia di bidang kelautan dan kemaritiman.¹²⁸ Pertama, identifikasi dan inventarisasi peluang investasi sektor kelautan dan kemaritiman yang dapat dikembangkan berbasis Ekonomi Biru. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa bidang investasi yang *visible* dalam hal ini adalah sektor perikanan dan kepelabuhanan. Kedua, mengembangkan usaha dan investasi sektor kelautan dan kemaritiman berbasis Ekonomi Biru. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia yang berbasis Ekonomi Biru. Keempat, diperlukannya dukungan pemerintah dan perbankan dalam pengembangan usaha sektor kelautan dan kemaritiman berbasis Ekonomi Biru. Tentu saja hal ini meliputi ketersediaan infrastruktur, kemudahan berusaha serta pemberian insentif. Kelima, terjalinnya *networking* antara pengusaha lokal dengan investor asing guna merealisasikan usaha berbasis Ekonomi Biru. Hal ini juga untuk mempermudah proses *transfer of technology* dan *know-how*.

Kunci dari ekonomi biru yang berbasis kelautan sebenarnya ada pada industrialisasi sektor kelautan dan kemaritiman. Industri dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya. Sedangkan industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dan perdagangan dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan struktur ekonomi.

¹²⁸Puspitawati, Dhiana, "Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman Berbasis Ekonomi Biru, Kesiapan Jawa Timur Memasuki Masyarakat ekonomi ASEAN", dalam Wijoyo, Suparto dan Rijadi, Prasetyo, PakDe Karwo Pintu Gerbang MEA 2015 harus dibuka, 2015.

Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, regionalisasi kawasan dengan penekanan pada perekonomian regional merupakan salah satu upaya yang banyak dilakukan oleh negara-negara dalam meningkatkan perekonomiannya. Indonesia, yang terletak di kawasan Asia-Tenggara sebenarnya sudah mempunyai suatu organisasi yang bersifat regionalisasi kawasan, yaitu ASEAN (*Association of Southeast Asia Nation*).

ASEAN resmi dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 yaitu dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration) oleh 5 Menteri Luar Negeri dari negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand di Bangkok, Thailand.⁴ Adapun tujuan dibentuknya ASEAN adalah sebagai berikut:¹²⁹

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan negara-negara Asia Tenggara melalui usaha bersana dalam semangat persamaan dan persahabatan bagi suatu masyarakat yang makmur dan damai.
2. Memelihara keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara tanpa ikut campur terhadap masalah dalam negeri anggota.
3. Mewujudkan kerjasama aktif dan saling membantu dalam masalah kepentingan bersama dibidang ekonomi, sosial, budaya, tehnik, ilmu pengetahuan, Administrasi.
4. Menyediakan bantuan terhadap satu dengan yang lainnya dalam bentuk latihan dan fasilitas penelitian dalam bidang pendidikan, propesi, tehnik, dan administrasi.
5. Melakukan kerjasama yang lebih efektif untuk memanfaatkan industri dan pertanian, perluasan perdagangan termasuk studi tentang masalah yang menyangkut komoditas perdagangan international, perbaikan fasilitas transfort dan komunikasi, serta peningkatan standar kehidupan masyarakat.
6. Memajukan studi tentang bangsa Asia Tenggara
7. Mempertahankan kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi regional dan international yang mempunyai tujuan serupa dan meneliti semua cara untuk mengadakan kerjasama yang lebih diantara diadakan konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT ASEAN)

Selanjutnya, guna mencapai tujuan tujuan tersebut, di dirikan beberapa mekanisme koordinasi, yaitupertemuan tahunan Menti Luar Negri, Standing Committe yang akan mengadakan pertemuan rutindiantara pertemuan tahunan Menti Luar Negri serta Sekretariat Nasional ASEAN yangberkedudukan di setiap negara anggota ASEAN. Dari tujuan didirikannya ASEAN

¹²⁹Deklarasi Bangkok 1967

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa lingkup kerja ASEAN meliputi kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan serta mengupayakan perdamaian dan stabilitas regional dengan berpegang teguh pada keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB.¹³⁰

Adapun visi ASEAN adalah sebagai “gabungan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang berpandangan terbuka, hidup dalam perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, terikat bersama dalam kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan dalam komunitas masyarakat yang peduli.”¹³¹ Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN dalam pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-kemanan dan sosialbudaya. Menurut Robert Gilpin regionalisme sebagaimana didirikannya ASEAN, menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh sekelompok negara dalam suatu kawasan tertentu untuk memajukan perekonomian dan kekuatan politik mereka dan telah menjadi fitur yang sangat penting terhadap pertumbuhan perekonomian global.¹³² Selanjutnya Gilpin mengatakan bahwa regionalisme ekonomi telah menjadi strategi dalam memperkuat perekonomian domestik negara dalam mendorong daya saing negara di dunia internasional.¹³³ Dengan demikian, regionalisme dan integrasi ekonomi merupakan dua hal yang tidak terpisahkan karena kemunculan regionalisme akan mendorong terjadinya integrasi ekonomi.

Selanjutnya, diantara kerjasama yang dijalin oleh negara-negara ASEAN, kerjasama di bidang perekonomianlah yang menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dibandingkan bidang kerjasama lainnya. Berbagai kesepakatan di bidang ekonomi telah dilakukan sejak pertama kali berdirinya ASEAN. Dimulai dengan *Preferential Tariff Arrangement* (PTA) pada tahun 1977. Kesepakatan perekonomian selanjutnya terjadi pada tahun 1992, dimana disepakati *Common Effective Preferential Tariff ASEAN Free-Trade Area* (CEPT-AAFTA) dengan target implementasi tahun 2008 yang kemudian dipercepat menjadi tahun 2002 dan 2003. Kesepakatan dalam bidang jasa mulai dimasukkan dalam kerjasama ekonomi ASEAN dengan ditandatanganinya *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) pada tahun 1995. Pada tahun 1998 disepakati kerjasama di bidang investasi ASEAN yang dikenal dengan ASEAN Investment Area (AIA).

Selanjutnya pada tahun 1997 disepakati ASEAN Vision 2020 yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan yang stabil, makmur serta berdaya-saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang

¹³⁰Deklarasi Bangkok sebagai dasar pembentukan ASEAN, sesuai ketentuan Hukum Internasional haruslah tetap berpegang teguh dan tidak menyimpangi ketentuan-ketentuan serta prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB.

¹³¹Kementrian Perdagangan, Informasi Umum Masyarakat Ekonomi ASEAN: ASEAN Community in a Global Community of Nations, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, 2011.

¹³²Gilpin, Robert, *Global Political Economy Understanding The International Economic Order*, Princeton University Press, New Jersey, 2001.

¹³³Ibid

merata yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi; mempercepat liberalisasi di bidang jasa serta meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasalainnya secara bebas di kawasan.¹³⁴ Pertemuan kepala negara ASEAN dilakukan kembali pada tahun 2003 dimana disepakati 3 pilar utama dalam mewujudkan ASEAN Vision, yang meliputi: (i) ASEAN Economic Community; (ii) ASEAN Political-Security Community dan (iii) ASEAN Socio-Cultural Community.¹³⁵ Pada tahun 2004 dimulai kerjasama ASEAN dengan negara-negara non-ASEAN untuk pertama kali. Secara berturut-turut pada tahun 2004 dan 2006 ditandatangani ASEAN-China FTA (*Goods*) dan ASEAN-Korea FTA (*Goods*). Pada tahun 2007 disepakati untuk mempercepat terwujudnya MEA dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Pada tahun yang sama ditandatangani pula *ASEAN Charter* dan *AEC Blueprint* (*Blueprint MEA*), ASEAN-China FTA (*services*) dan ASEAN-Korea FTA (*services*). Pada tahun 2008 blueprint MEA mulai diimplementasikan dan ASEAN Charter mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2008.

Selanjutnya guna percepatan MEA, ASEAN merumuskan *ASEAN Charter* atau yang dikenal dengan Piagam ASEAN sebagai payung hukum atau dasar komitmen kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia-Tenggara. Piagam ASEAN ini memuat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh negara-negara ASEAN dalam mencapai tujuan integrasi di kawasan ASEAN. Naskah Piagam ASEAN ini kemudian ditandatangani oleh para kepala negara/pemerintahan negara-negara ASEAN pada KTT ke-13 di Singapura pada tahun 2007. Piagam ASEAN ini baru berlaku efektif pada tanggal 15 Desember 2008. Indonesia telah melakukan ratifikasi Piagam ASEAN dengan Undang-Undang No.38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of South-East Asia Nations*. Diantara 3 pilar utama ASEAN Vision, *ASEAN Economic Community* (AEC) lah yang berkembang lebih cepat dibandingkan 2 pilar lainnya. Pada tahun 2006 di Kuala Lumpur Malaysia para menteri perekonomian ASEAN telah sepakat untuk mengembangkan *ASEAN Economic Community Blueprint* untuk mendorong terwujudnya AEC/MEA. *AEC Blueprint* ini merupakan pedoman bagi negara-negara ASEAN untuk mencapai AEC 2015, yang memuat 4 kerangka utama yang meliputi:¹³⁶

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;

¹³⁴ASEAN Summit, Kuala Lumpur, Desember 1997

¹³⁵ASEAN Summit, Bali, Oktober 2003

¹³⁶Untuk gagasan MEA secara rinci baca lebih lanjut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, 2013

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce;
3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa untuk integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam)
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan
5. meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia.¹³⁷ Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy*, *consumer protection*, *Intellectual Property Rights (IPR)*, *taxation*, dan *E-Commerce*. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem *Double Taxation*, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*. Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi. Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan

¹³⁷Arya baskoro peluang, tantangan, dan risiko bagi indonesia dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN peluang, tantangan, dan risiko bagi indonesia dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN; 2011

kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

Penerapan Ekonomi Biru dalam meningkatkan daya saing Indonesia dalam MEA

Dengan diberlakukannya MEA, maka negara-negara yang tergabung dalam ASEAN harus menyiapkan diri dengan menggali potensi negaranya guna meningkatkan daya saing nasionalnya. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, sebagai negara kepulauan tentunya Indonesia mempunyai sumber daya laut yang melimpah, yang merupakan potensi utama Indonesia dalam menghadapi MEA. Pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya laut, dengan demikian menjadi sangatlah penting, terutama dalam pengaturan hukum pengelolaan sumber daya laut.

Penerapan konsep *Blue Economy* dalam pengelolaan sumber daya laut tidak hanya akan membantu Indonesia meningkatkan pendapatan dari hasil sumber daya alam yang dimiliki negara, akan tetapi juga dapat melestarikan wilayah lautan Indonesia mengingat konsep yang digunakan adalah juga memanfaatkan limbah laut yang jarang dimanfaatkan yang tentunya dapat menguntungkan negara.

Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan *exploitation risk*. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya

C. Kesimpulan dan Saran

Fitur regionalisasi dianggap mampu mendorong sistem perekonomian global. Dalam perjalanannya regionalisasi dianggap sangat membantu dalam berbagai bidang, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara dalam suatu kawasan tertentu. Selanjutnya integrasi ekonomi dalam suatu region merupakan hal yang penting dalam pencapaian suatu peningkatan ekonomi di kawasan tertentu seperti misalnya di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai suatu organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang salah satunya adalah kesepakatan untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan terbentuknya MEA negara-negara yang tergabung dalam ASEAN konsekuensinya harus meningkatkan pertumbuhannya agar mempunyai daya saing tinggi sehingga mampu bersaing dengan negara lain.

Sebagai negara yang memiliki 34 provinsi, guna mendukung terbentuknya MEA seyogyanya melihat pada potensi daerah, khususnya daerah provinsi untuk dapat dikembangkan dalam sektor ekonomi. Konsep ekonomi biru diharapkan bisa menjadi akselerator bagi terwujudnya pembangunan perekonomian berbasis kelautan dan kemaritiman dengan mengaplikasikan pendekatan ekonomi biru. Hal ini bisa dilakukan dengan strategi melakukan industrialisasi di sektor kelautan dan kemaritiman berlandaskan ekonomi biru yang *zero waste* dan berkelanjutan. Pergeseran paradigma dari *mid-set* daratan ke *mind-set* kelautan juga harus dilakukan. Dengan adanya perubahan *mind-set* tersebut, akan mempermudah pembangunan di sektor kelautan dan kemaritiman sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan nilai tambah industri kelautan dan kemaritiman sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A and Ribot, J.C., "Accountability in Decentralization: A Framework with South Asian and African Cases" (1993) 33 *Journal of Developing Areas* 473
- APEC Marine Resource Conservation Working Group, *Report of the Workshop on Integrated Ocean Management in the APEC Region*, Vancouver, British Columbia, Canada, 12 – 15 December 2000.
- Arya baskoro ,peluang, tantangan, dan risiko bagi indonesia dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN 2011
- ASEAN Summit, Bali, Oktober 2003
- ASEAN Summit, Kuala Lumpur, Desember 1997
- Bailet, Francois, "Ocean Governance and Human Security: Ocean and Sustainable Development, International Regimes, Current Trends and Available Tools", UNITAR Workshop on Human Security and the Sea, Hiroshima, Japan, (2005)
- Deklarasi Bangkok 1967
- Dewan Kelautan Indonesia," Tantangan Bangsa Indonesia dalam Pembangunan Industri Kelautan dan Perikanan menuju Ekonomi Biru di abad ke-21", paper dipresentasikan pada Seminar Kelautan, Surabaya, 4 Desember 2012.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

Gilpin, Robert, *Global Political Economy Understanding The International Economic Order*, Princenton University Press, New Jersey, 2001.

Kementrian Perdagangan, Informasi Umum Masyarakat Ekonomi ASEAN: ASEAN Community in a Global Community of Nations, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, 2011.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo, sebagaimana dikutip dalam Dewan Kelautan Indonesia, "Cara Optimalkan SDA Laut Ramah Lingkungan", *Indonesia Maritim*, Edisi 29, Tahun VIII, Januari-Maret 2013, 8.

Pauli, Gunter, *The Blue Economy: 10 years, 100 innovations and 100 million jobs*, 2010; Pidato Gunter Pauli pada Forum Group Discussion tentang Ekonomi Biru di Jakarta pada tanggal 26 November 2013.

Puspitawati, Dhiana, "Sinergitas Hukum Laut dan Hukum Maritim: Menuju Ekonomi Biru", *Indonesia Maritim*, Edisi 29, Tahun VIII, Januari-Maret 2013, 16.

Puspitawati, Dhiana, "Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman Berbasis Ekonomi Biru, Kesiapan Jawa Timur Memasuki Masyarakat ekonomi ASEA", dalam Wijoyo, Suparto dan Rijadi, Prasetjo, PakDe Karwo Pintu Gerbang MEA 2015 harus dibuka, 2015.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan